

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Dewasa ini, penelitian tentang kemitraan sudah banyak dilakukan. Penelitian masing-masing fokus pada perbandingan kesejahteraan antara masyarakat yang ikut serta dalam anggota kemitraan dengan masyarakat non-kemitraan, evaluasi berjalannya kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah, dan pola kemitraan studi kasus desa. Masih jarang ditemukan penelitian tentang kerjasama kemitraan terkait indikator kelayakan teknis dan moral calon mitra.

Devita (2012) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani tebu dalam keikutsertaan kemitraan dengan PG. Pesantren Baru, mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh petani yang ikut serta dalam kemitraan lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak mengikuti kemitraan. Faktor teknis yang berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan dalam mengikuti kemitraan adalah luas lahan, semakin besar luas lahan yang dimiliki maka semakin besar potensi untuk mengikuti kemitraan. Pola kemitraan yang diikuti petani adalah pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis).

Titah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani tebu melakukan kemitraan dengan pabrik Tjoekir dalam upaya peningkatan pendapatan petani, mengungkapkan bahwa pola kemitraan yang terjalin antara petani dengan PG. Tjoekir adalah pola kemitraan inti - plasma, kendala yang ditemukan oleh peneliti adalah PG. Tjoekir menghadapi petani curang dan kredit macet, sering tidak tuntas (dibayarkan), sedangkan dari pihak petani menghadapi permasalahan rendemen yang ditentukan pihak PG. Tjoekir sangat rendah, sehingga terlambatnya SPTA, distribusi saprodi dan bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak PG. Faktor yang mempengaruhi keputusan keikutsertaan petani dalam kerjasama mitra adalah jumlah keluarga dan luas lahan yang dimiliki.

Anisa (2015) dalam penelitian yang berjudul Pola Kemitraan antara Gapoktan "Sumberejo" dengan PT. Unilever Indonesia Tbk. Dalam Usahatani Kedelai Hitam di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

menyatakan bahwa pola kemitraan yang terjalin antara Gapoktan Sambirejo dengan PT. Unilever Indonesia adalah tipe pola kemitraan sub-kontrak. Persepsi petani mitra terhadap kemitraan kedelai hitam di Desa Sambirejo adalah positif, petani mitra beranggapan bahwa dengan mengikuti kemitraan dapat meningkatkan pendapatan usahatani serta lebih mengutamakan kepastian keuntungan yang diperoleh, sedangkan persepsi petani non-mitra terhadap kemitraan kedelai hitam di Desa Sambirejo adalah kurang positif. Persepsi kurang positif dari petani non-mitra tersebut karena mereka merasa meskipun secara ekonomi lebih menguntungkan tapi secara sosial budaya dari segi pengalaman atau kebiasaan dipandang kurang menguntungkan.

Persamaan penelitian Devita (2012) dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan identifikasi pelaksanaan teknis kemitraan. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, yaitu pada penelitian Devita (2012) membandingkan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam keikutsertaan kerjasama mitra. Sementara itu penelitian ini mengidentifikasi kelayakan secara teknis (non-biaya) dan moral calon mitra. Persamaan penelitian Titah (2012) dengan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif tentang kemitraan yang terjalin antara petani dengan PG. Tjoekir. Perbedaan terletak pada batasan ruang penelitian, yang mana pada penelitian Titah (2012) hanya mendeskripsikan pola kemitraan petani komoditas tebu dengan perusahaan mitra. Penelitian ini lebih luas dalam mendeskripsikan pola kemitraan di kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo yang tersebar di tiga desa dalam tiga kabupaten. Persamaan penelitian Anisa (2015) dengan penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikan pola kemitraan yang terjalin antar pelaku mitra, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, pada penelitian Anisa (2015), objek penelitian adalah pola kemitraan yang terjalin antara petani dengan PT. Unilever Indonesia Tbk, sedangkan pada penelitian ini memungkinkan mendeskripsikan pola kemitraan antar petani, petani dengan perusahaan swasta dan petani dengan instansi pemerintah.

2.2 Tinjauan Agronomi

Agronomi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik secara maksimal (Sumantri, 1980). Menurut Harjadi (1986) dalam Ritung *et al* (2007), agronomi adalah cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungan untuk memperoleh produksi yang maksimal. Secara garis besar ilmu agronomi merupakan ilmu yang melingkupi lingkungan tanaman, pengelolaan, dan produksi maksimal.

Lingkungan bagi tanaman adalah segala sesuatu kondisi yang mendukung kembang dan tumbuh tanaman. Lahan merupakan kesatuan dari berbagai sumberdaya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan ditentukan berbagai macam sumberdaya yang ada didalam lahan dan permukaannya (Notohadiprawiro, 2006).

Lahan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan mencapai keuntungan usahatani. Maka perlu memperhatikan aspek kesesuaian lahan dalam kegiatan ushatani. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan *input- input* yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai (Ritung *et al*, 2007).

2.2.1 Klasifikasi Lahan

Struktur klasifikasi lahan menurut FAO dalam Ritung *et al* (2007) dapat dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat Ordo, Kelas, Subkelas dan Unit.

Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. Pada tingkat ordo kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai ($S = Suitable$) dan lahan yang tidak sesuai ($N = Not Suitable$). Kelas adalah keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Berdasarkan tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala pemetaan, kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi: (1) Untuk pemetaan tingkat semi detail (skala 1:25.000-1:50.000) pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan ke dalam tiga kelas, yaitu: lahan sangat sesuai ($S1$), cukup sesuai ($S2$), dan sesuai marginal ($S3$). Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N) tidak dibedakan ke dalam kelas - kelas. (2) Untuk pemetaan tingkat tinjau (skala 1:100.000-1:250.000) pada tingkat kelas dibedakan atas Kelas sesuai (S), sesuai bersyarat (CS) dan tidak sesuai (N).

2. 2. 2 Kualitas dan Karakteristik Lahan

Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau *attribute* yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan (*performance*) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (*land characteristics*). Menurut FAO dalam Ritung *et al* (2007) Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan. Hubungan antara kualitas dan karakteristik lahan diberikan pada Tabel 1.

Tabel. 1. Hubungan antara kualitas dan karakteristik lahan yang dipakai pada metode evaluasi lahan menurut Djaenudin *et al*. dalam Ritung *et al* (2007).

KUALITAS LAHAN	KARAKTERISTIK LAHAN
Temperatur (tc)	Temperatur rata- rata ($^{\circ}C$)
Ketersediaan air (wa)	Curah hujan (mm), Kelembapan (%), Lamanya bulan kering (bln)
Ketersediaan oksigen (oa)	Drainase
Keadaan media perakaran (rc)	Tekstur, bahan kasar (%), kedalaman tanah (cm)
Gambut	Ketebalan (cm), ketebalan (cm) jika ada sisipan bahan mineral/ pengkayaan, kematangan
Retensi hara (nr)	KTK liat (cmol/kg), kejenuhan basa (%), Ph_{H_2O} C-organik (%)
Toksisitas (xc)	Salinitas (dS/m)

Tabel 1. (Lanjutan)

KUALITAS LAHAN	KARAKTERISTIK LAHAN
Sodisitas (xn)	Alkalinitas/ESP (%)
Bahaya sulfidik (xs)	Kedalaman sulfidik (cm)
Bahaya erosi (eh)	Lereng (%), Bahaya erosi
Bahaya banjir (th)	Genangan
Penyiapan lahan(lp)	Batuan dipermukaan (%), singkapan batuan (%)

Sumber : Ritung *et al*, 2007

Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim. Karakteristik lahan tersebut (terutama topografi dan tanah) merupakan unsur pembentuk satuan peta tanah.

1. Topografi

Tabel 2. Bentuk wilayah dan kelas lereng

No.	Relief	Lereng (%)
1	Datar	< 3
2	Berombak/ agak melandai	3 – 8
3	Bergelombang/ melandai	8 – 15
4	Berbukit	15 – 30
5	Bergunung	30 – 40
6	Bergunung curam	40 – 60
7	Bergunung sangat curam	> 60

Sumber : Ritung *et al*., 2007

Ketinggian tempat diukur dari permukaan laut (dpl) sebagai titik nol. Dalam kaitannya dengan tanaman, secara umum sering dibedakan antara dataran rendah (<700 m dpl.) dan dataran tinggi (> 700 m dpl.). Namun dalam kesesuaian tanaman terhadap ketinggian tempat berkaitan erat dengan temperatur dan radiasi matahari. Semakin tinggi tempat di atas permukaan laut, maka temperatur semakin menurun. Demikian pula dengan radiasi matahari cenderung menurun dengan semakin tinggi dari permukaan laut. Ketinggian tempat dapat dikelaskan sesuai kebutuhan tanaman.

2. Tanah

Faktor tanah dalam evaluasi kesesuaian lahan ditentukan oleh beberapa sifat atau karakteristik tanah di antaranya drainase tanah, tekstur, kedalaman tanah dan retensi hara (pH, KTK), serta beberapa sifat lainnya diantaranya alkalinitas, bahaya erosi, dan banjir/genangan.

a. Drainase tanah

Drainase tanah menunjukkan kecepatan meresapnya air dari tanah atau keadaan tanah yang menunjukkan lamanya dan seringnya jenuh air.

Tabel 3. Kelas Drainase

No.	Kelas Drainase	Uraian
1.	Cepat (<i>excessively drained</i>)	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolis tinggi sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian tidak cocok untuk tanaman tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi).
2.	Agak cepat (<i>somewhat excessively drained</i>)	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolis tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian hanya cocok untuk sebagian tanaman kalau tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi).
3.	Baik (<i>well drained</i>)	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolis sedang dan daya menahan air sedang, lembab, tapi tidak cukup basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan 0 sampai 100 cm.
4.	Agak baik (<i>moderately well drained</i>)	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolis sedang sampai agak rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah, tanah basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan 0 sampai 50 cm.
5.	Agak terhambat (<i>somewhat poorly drained</i>)	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolis agak rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah sampai sangat rendah, tanah basah sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan 0 sampai 25 cm.
6.	Terhambat (<i>poorly drained</i>)	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolis rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah sampai sangat rendah, tanah basah untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley

Tabel 3. (Lanjutan)

No.	Kelas Drainase	Uraian
7.	Sangat terhambat (<i>very poorly drained</i>)	(reduksi) dan bercak atau karatan besi dan/atau mangan sedikit pada lapisan sampai permukaan. Tanah dengan konduktivitas hidrolis sangat rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) sangat rendah, tanah basah secara permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley (reduksi) permanen sampai pada lapisan permukaan.

Sumber : Ritung *et al*, 2007

b. Bahaya erosi

Tingkat bahaya erosi dapat diprediksi berdasarkan kondisi lapangan, yaitu dengan cara memperhatikan adanya erosi lembar permukaan (*sheet erosion*), erosi alur (*rill erosion*), dan erosi parit (*gully erosion*). Pendekatan lain untuk memprediksi tingkat bahaya erosi yang relatif lebih mudah dilakukan adalah dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata) pertahun, dibandingkan tanah yang tidak tererosi yang dicirikan oleh masih adanya horizon A. Horizon A biasanya dicirikan oleh warna gelap karena relatif mengandung bahan organik yang lebih tinggi. Tingkat bahaya erosi disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Table. 4. Tingkat bahaya erosi

Tingkat bahaya erosi	Jumlah tanah permukaan yang hilang (cm/tahun)
Sangat ringan (sr)	< 0,15
Ringan (r)	0,15 – 0,9
Sedang (s)	0,9 – 1,8
Berat (b)	1,8 – 4,8
Sangat berat (sb)	> 4,8

Sumber : Ritung *et al*, 2007

3. Iklim

a. Suhu udara

Pada daerah yang data suhu udaranya tidak tersedia, suhu udara diperkirakan berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut. Semakin tinggi tempat, semakin rendah suhu udara rata-ratanya dan hubungan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Braak* :

$$26,6^{\circ}\text{C} (0,01 \times \text{elevensi dalam } x \text{ } 0,6^{\circ}\text{C}$$

b. Curah hujan

Untuk keperluan penilaian kesesuaian lahan biasanya dinyatakan dalam jumlah curah hujan tahunan, jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. Oldeman (1975) mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah hujan >200 mm, sedangkan bulan kering mempunyai curah hujan <100 mm. Kriteria ini lebih diperuntukkan bagi tanaman pangan, terutama untuk padi. Berdasarkan kriteria tersebut Oldeman (1975) membagi zone agroklimat kedalam 5 kelas utama (A, B, C, D dan E). Sedangkan Schmidt & Ferguson (1951) membuat klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan yang berbeda, yakni bulan basah (>100 mm) dan bulan kering (<60 mm). Kriteria yang terakhir lebih bersifat umum untuk pertanian dan biasanya digunakan untuk penilaian tanaman tahunan.

2.3 Teori Moral Hazard

Simurangkir (1978), menuliskan kata Moral berasal dari bahasa latin “*Mores*” yang artinya sila atau peraturan hidup. Susila berasal dari bahasa sangsakerta yang artinya dasar-dasar, prinsip atau peraturan hidup (sila). Perkataan “Su” artinya lebih baik, sehingga susila dapat diterjemahkan menjadi “peraturan- peraturan hidup yang lebih baik”. Sila ini dalam pelaksanaannya bagi anggota- anggota masyarakat mengikat, juga sila ini dilaksanakan secara terus-menerus dan manusia berusaha meningkatkannya. Moral ialah kesusilaan atau peraturan- peraturan hidup yang lebih baik, yang berlandaskan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

1. Jujur

Menurut Simurangkir (1978), jujur merupakan perilaku seseorang yang identik dengan seseorang yang dapat dipercaya. Dalam budaya negara Inggris, seseorang yang dapat dipercaya dari perilaku kejujurannya disebut *gentlement*. Perseorangan yang bersikap jujur mampu menahan diri dari perilaku kurang bersih dari godaan materi. Sehingga seseorang yang bersikap jujur tidak dipandang remeh, dan disegani dikalangannya.

2. Disiplin

Disiplin merupakan tindakan atau perilaku yang ditunjukkan dengan manajemen individu pada dirinya sendiri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara sistematis dan taat kepada waktu.

3. Rajin

Rajin merupakan tindakan yang ditunjukkan oleh individu dengan etos kerja yang baik. Yaitu kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan tanpa melakukan kesalahan.

4. Tekun

Tekun merupakan bentuk tindakan yang ditunjukkan oleh seseorang dengan kecintaan dan ketulusan dalam melaksanakan pekerjaan yang umumnya menjadi hobi individu tersebut, sehingga melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ikhlas dan tidak mengeluh.

5. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki setiap orang karena merupakan sebuah nilai pada diri setiap orang untuk dapat mengemban tugas dan kewajiban yang telah disanggupinya. Simurankir (1978) menyimpulkan bahwa yang disebut dengan tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dari segala akibat daripada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan dengan baik. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat yang ditimbulkan dari tindakan atau perbuatan buruk itu. Dalam tanggung jawab tersebut terkandung sesuatu yang azasi, yaitu unsur kewajiban. Simurankir (1978), mengemukakan Pemahaman tanggung jawab moral bagi orang Jepang mengandung unsur-unsur menanggung akibat sampai sejauh-jauhnya, kalau perlu mengorbankan diri sendiri terhadap suatu tugas yang telah disanggupi.

Dalam teori ekonomi, *Moral Hazard* adalah situasi di mana satu pihak akan memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko karena biaya yang dapat dikenakan tidak akan dirasakan oleh pihak mengambil risiko. Dengan kata lain,

itu adalah kecenderungan untuk menjadi lebih berani mengambil risiko, mengetahui bahwa biaya potensial dan / atau beban mengambil risiko tersebut akan ditanggung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh orang lain. *Moral Hazard* dapat terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah sehingga merugikan pihak lain setelah transaksi keuangan telah terjadi (Prasetya, 2012).

Moral hazard muncul karena individu atau lembaga tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab dari tindakannya, dan karenanya memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati - hati, meninggalkan pihak lain untuk memegang beberapa tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Secara umum, moral hazard terjadi ketika pihak dengan informasi lebih lanjut tentang tindakan atau niat memiliki kecenderungan atau dorongan untuk berperilaku tidak tepat dari perspektif partai dengan kurang informasi (Prasetya, 2012). Menurut Taswan (2009), Problem moral hazard menyangkut siapa yang akan menyimpang, mengapa menyimpang dan siapa yang dirugikan akibat tindakan tersebut.

Tinjauan tentang *Moral Hazard* ini merupakan tinjauan awal untuk mengidentifikasi indikator kelayakan moral dalam kerjasama kemitraan yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis pelaksanaan kemitraan dilokasi penelitian.

2.4 Teori Kemitraan

Teori kemitraan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan-hubungan hirarki atau pertukaran hak kepemilikan (*Property Right*) antar individu atau organisasi (Eggertsson, 1990; Nugroho, 2006). Bijman (2008) menyatakan bahwa kerjasama kemitraan sudah ada semenjak lama. Terutama pengelolaan komoditas pertanian yang tidak dapat bertahan lama dalam proses pengiriman kebutuhan industri, seperti susu untuk kebutuhan industri setiap hari, buah dan sayur untuk diawetkan.

2.4.1 Definisi dan Prinsip- prinsip Kemitraan

Sistem kemitraan (*Contract farming*) menurut Daryanto (2007) merupakan suatu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang menambah kekuatan posisi tawar petani, peternak, dan nelayan atau petani tambak dengan menghubungkan secara

langsung maupun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi memiliki posisi tawar yang relatif lebih kuat. Melalui kerjasama petani, peternak, dan nelayan dengan badan usaha tersebut petani memiliki potensi untuk meningkatkan usahanya, beralih dari usaha tradisional/ subsisten ke usaha yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Kemitraan usaha menurut Kartasmita *dalam* Titah (2012) merupakan hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis, hasilnya bukan *zero-sum-game*, tetapi *positive-sum-game* atau *win-win solution*.

Maka dapat diartikan bahwa kemitraan merupakan suatu kerjasama antar dua pihak atau lebih dengan tujuan meningkatkan posisi tawar masing-masing pihak dalam kegiatan ekonomi untuk menguntungkan masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Sesuai dengan pernyataan Roesmanto (2000) kemitraan sebagai strategi bisnis yang dilakukan oleh dua lembaga dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat atau keuntungan bersama sesuai prinsip saling mengisi dan membutuhkan. Sehingga tercapai kesepakatan yang ada dalam kerjasama kemitraan tersebut.

Menurut Hafsah (1999), pada dasarnya prinsip kemitraan berlandaskan tujuan saling memperkuat antar pihak pelaku mitra. Kemitraan yang ideal adalah kemitraan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi menengah dan kuat dengan pihak pengusaha kecil yang didasari oleh kesejajaran kedudukan dan derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan tujuan meningkatkan keuntungan dan pendapatan bagi semua pihak yang bermitra melalui pengembangan usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain dan meningkatnya rasa saling percaya.

Sedangkan menurut Yusnitasari *dalam* Titah (2012), suatu hubungan kerjasama kemitraan akan berjalan baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan jika memperhatikan beberapa prinsip dasar kemitraan sebagai berikut:

- a. Ada pelaku kemitraan.
- b. Ada kebutuhan dan kepentingan bersama.
- c. Ada kerjasama dan keterkaitan yang seimbang, wajar, serasi, harmonis dan saling menguntungkan antar pelaku usaha dalam pegadaan sarana produksi

dan pemasaran serta faktor- faktor penunjang usaha yang bertujuan untuk memperkuat struktur usaha, proses tawar menawar dan kesamaan misi.

Tinjauan tentang prinsip- prinsip kemitraan tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan dalam mendeskripsikan hak dan kewajiban pihak- pihak pelaku kemitraan terutama masyarakat agroekosistem di desa Ngadas, Ngadisari, Wonokitri kawasan dataran tinggi Bromo.

2.4.2 Pola- Pola Kemitraan

Terdapat beberapa macam pola kerjasama kemitraan yang dikenal di masyarakat Indonesia menurut Sumardjo (2004), diantaranya sebagai berikut:

1. Pola kemitraan inti- plasma

Merupakan pola yang menunjukkan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai perusahaan plasma, dengan perusahaan inti sebagai mitra usaha. Keberadaan perusahaan plasma bertugas sebagai penyedia lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen menampung, mengolah dan memasarkan. Sementara itu kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai kesepakatan yang telah disetujui.

a. Keunggulan

- 1) Terciptanya hubungan saling ketergantungan dan tujuan saling memperoleh keuntungan.
- 2) Terjadi peningkatan usaha.
- 3) Dapat mendorong perkembangan ekonomi.

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya pemahaman hak dan kewajiban dari pihak plasma, sehingga kesepakatan bersama berjalan kurang lancar.
- 2) Lemahnya komitmen perusahaan inti, fungsi dan kewajibannya tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga merugikan pihak plasma sebagai pihak yang lemah permodalannya.

2. Pola kemitraan sub- kontrak

Pola ini merupakan kerjasama antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang bertugas sebagai produsen komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

a. Keunggulan

Peningkatan pengetahuan dari proses terciptanya alih teknologi, modal, ketrampilan, produktivitas dan terjaminnya pemasaran produk yang dihasilkan kelompok mitra.

b. Kelemahan

- 1) hubungan sub- kontrak yang terjalin mengarah ke monopoli atau monopsoni, semakin lama produsen kecil cenderung terisolasi, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran.
 - 2) Prinsip nilai- nilai kemitraan semakin berkurang antara kedua belah pihak. Prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling menghidupi berubah menjadi penekanan terhadap harga *input* yang tinggi atau pembelian produk dengan harga rendah.
 - 3) Tidak seimbang antara kontrol kualitas ketat dengan sistem pembayaran yang tepat. Pembayaran yang dilakukan perusahaan inti mengalami keterlambatan, dan timbulnya gejala eksploitasi tenaga kerja untuk mengejar target produksi.
3. Pola kemitraan dagang umum

Pola kemitraan dagang umum menunjukkan hubungan kerjasama antara pemasok komoditas dengan kelompok pihak pemasar produk. Pola ini merupakan kerjasama dalam pemasaran komoditi hasil produksi, umumnya produk hortikultura.

a. Keunggulan

Kerjasama antar pihak produsen dengan pemasar, sehingga memudahkan produsen dalam menyalurkan hasil produksi kepada konsumen dengan efisiensi biaya distribusi, karena sudah menjadi tanggung jawab pihak pemasar. Diperlukan struktur pendanaan yang kuat antar kedua belah pihak, karena keuntungan terletak pada selisih margin harga produk yang dipasarkan sampai ke tangan konsumen.

b. Kelemahan

- 1) Terjadinya penentuan secara sepihak atas harga dan volume produk oleh pengusaha mitra, sehingga merugikan pihak kelompok mitra.
 - 2) Realita pembayaran seringkali berubah menjadi bentuk konsinyasi, sehingga merugikan pihak kelompok mitra, karna terbatasnya perputaran uang sebagai modal produksi.
4. Pola kemitraan keagenan

Bentuk kemitraan antara perusahaan pengusaha mitra dengan kelompok mitra atau kategori pengusaha kecil dengan modal terbatas, yang mana pengusaha mitra sebagai pemasok barang atau jasa kepada pengusaha kecil, untuk selanjutnya pengusaha kecil memasarkannya dengan hak khusus yang diberikan oleh pengusaha mitra.

a. Keunggulan

Menguntungkan pihak mitra pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan modal, sistemnya sama dengan konsinyasi, yang mana perusahaan besar sebagai pemasok dengan hak khusus.

b. Kelemahan

- 1) Penentuan secara sepihak oleh pengusaha kecil mitra atas harga barang atau jasa yang dipasarkan, sehingga konsumen harus menanggung biaya harga yang lebih tinggi.
- 2) Kurangnya informasi segmen pasar di pihak kelompok mitra pengusaha kecil karena, umumnya produk yang dipasarkan terbatas dari beberapa mitra usaha.

5. Pola kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola kemitraan KOA merupakan pola hubungan bisnis kelompok mitra sebagai penyedia biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi, untuk usahatani komoditas tertentu, dengan pengusaha mitra sebagai pengolah tingkat lanjut hasil produksi kelompok mitra dan memasarkannya.

a. Keunggulan

Keunggulannya pola kemitraan ini hampir sama dengan pola kemitraan inti- plasma. Umumnya sistem ini diberlakukan di pedesaan antara pemilik lahan dengan rumah tangga pengolah lahan.

b. Kelemahan

- 1) Keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan mitra lebih besar dari besarnya penguasaan pemasaran dan pengolahan, sehingga dirasa kurang adil bagi kelompok mitra.
- 2) Kecenderungan monopsoni oleh perusahaan mitra, sehingga memperkecil keuntungan kelompok mitra (Sumardjo, 2004).

Dalam perkembangan pola kemitraan agribisnis menurut Soepeno dalam Titah (2012), pola kemitraan Agribisnis memiliki tiga pola yaitu:

a. Pola kemitraan tradisional

Pola ini terdiri dari *patron-client* dimana *patron* adalah pemilik modal atau peralatan produksi strategis dan *client* adalah petani penggarap, peternak atau pelayan pekerja. Umumnya pola kemitraan yang berkembang bersifat horizontal, yang bergerak dibidang produksi atau usahatani, sedangkan kemitraan ini lebih bersifat vertikal, diwarnai hubungan hutang antara pedagang dan petani produsen. Secara terselubung terjadi eksploitasi secara berkelanjutan. Pola ini menghambat kreativitas para pelakunya karena ada ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga kurang menstimulasi tumbuhnya semangat mandiri.

Perjanjian “Bagi Hasil” merupakan suatu perjanjian yang umum ditemukan di masyarakat pedesaan sebagai pola kemitraan tradisional. Sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Pengusahaan tanah dengan sistem “Bagi Hasil” di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut :

1) Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overeenkomst*) menurut Djaren dalam Eko (2008) menyatakan:

“Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini berhak dalam mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu”.

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren adalah untuk memproduksi tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan bagi pamaruh (*deelbouwer*) fungsi dari perjanjian ini adalah untuk memproduksi tanah tanpa memiliki tanah.

2) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman dalam Eko (2008):

“Sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan “.

Pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan bahwa setiap orang yang menanam tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanam harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.

3) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad *dalam* Eko (2008):

“Apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian (separo kalau “**Memperduai**” atau “**Maro**” serta sepertiga kalau “**Mertelu**” atau “**Jejuron**”) hasil tanahnya ke pada pemilik tanah “.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil yaitu :

- a) Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
- b) Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama.
- c) Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

Jadi Perjanjian “Bagi Hasil” menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

b. Pola kemitraan pemerintah

Sifat vertikal cenderung terjadi pada pola ini, dengan modal bapak angkat. Pola kemitraan pemerintahan terjadi penyerapan inovasi yang lebih maju, tapi tetap ada potensi kemungkinan terjadinya eksploitasi legal oleh bapak terhadap anak angkatnya.

c. Pola kemitraan pasar

Dengan perkembangan ekonomi pasar usaha pertanian rakyat di pedesaan diimbangi dengan pola kemitraan pasar, yang mana melibatkan petani dengan

pengusaha pemilik modal besar yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran hasil berlandaskan kepentingan ekonomi untuk berbagi manfaat ekonomi. Pola ini merupakan jenis pola kemitraan yang sudah jauh lebih baik dalam hal penyerapan inovasi dibandingkan pola- pola sebelumnya, tetapi kelemahannya tetap pada ketergantungan petani terhadap pengusaha besar.

Tinjauan tentang pola kemitraan tersebut digunakan sebagai acuan untuk mendiskripsikan pola kemitraan yang terjalin antara pihak- pihak pelaku kemitraan terutama masyarakat agroekosistem di desa Ngadas, Ngadisari dan Wonokitri kawasan dataran tinggi Bromo.

2.4.3 Proses Kemitraan

Proses kemitraan merupakan mekanisme secara teknis awal proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kemitraan yang terlaksana. Teori yang pasti mengenai proses kemitraan ini tidak diketemukan, maka diambil suatu teori yang hampir sama dengan proses kemitraan yaitu teori manajemen, sesuai dengan pernyataan Soeroso *dalam* Titah (2012) bahwa teori manajemen tersebut dapat dianalogikan sebagai teori proses kemitraan, karena manajemen memiliki pengertian sebuah proses awal hingga akhir untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Koontz dan O'Donel *dalam* Firdaus (2009) dalam ilmu manajemen, penerapan perencanaan sebagai proses kegiatan yang mana orang membayangkan kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi dimasa yang akan datang, kemudian orang memilih dan memutuskan kemungkinan yang dianggap paling baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Soeroso *dalam* Titah (2012) perencanaan merupakan hal penting yang pertama, karena sebelum perencanaan dilaksanakan atau dirumuskan, maka mustahil sekali merumuskan fungsi manajemen yang lainnya, seperti pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Fungsi manajemen poin pelaksanaan menurut Mardikanto dan Sutarni (1982) pelaksanaan atau "*actuating*" merupakan serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Hal tersebut dapat ditarik sebuah persamaan dengan pelaksanaan kemitraan yaitu, serangkaian kegiatan bagaimana kemitraan dijalankan, kapan

kemitraan dilakukan, dimana kemitraan berlangsung dan dengan pihak siapa melakukan kemitraan tersebut.

Kegiatan evaluasi menurut Reksohadiprodjo (1992) dalam fungsi manajemen merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar bertindak sesuai dengan rencana, membatasi tindakan supaya tidak menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengawasan terdiri dari penentuan standar, pengawasan kegiatan atau pemeriksaan, dan perbandingan hasil dengan standar. Sama halnya yang dinyatakan oleh Suryadi (1978) bahwa evaluasi berarti memberikan penilaian terhadap suatu hal (keadaan, peristiwa, kegiatan tertentu) menggunakan standar penilaian tertentu dan bertujuan menarik beberapa kesimpulan dan menetapkan keputusan tertentu.

Tinjauan tentang proses kemitraan tersebut digunakan sebagai acuan untuk mendiskripsikan proses kemitraan yang terjalin antara pihak- pihak pelaku kemitraan terutama masyarakat agroekologi di desa Ngadas, Ngadisari, dan Wonokitri kawasan dataran tinggi Bromo.

